
Peran Kebijakan Nasional Dalam Mendorong Inovasi Layanan Kebidanan Daerah 3T Berbasis Komunitas : Scoping Review

The Role of National Policy in Encouraging Community-Based Midwifery Service Innovations in 3T Areas: A Scoping Review

Rosmala Atina Rusadi^{1*}, Dida Wati²

¹Universitas Muhammadiyah Bogor Raya

²Universitas Muhammadiyah Bogor Raya

*Email Korespondensi : rosmalaatinarusadi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article History

Received : 25 Desember 2024

Revised: 05 Januari 2025

Accepted : 13 Januari 2025

Kata Kunci:

Daerah 3T, Inovasi, Kebijakan Nasional, Komunitas, Layanan Kebidanan

Keywords:

3T areas, innovation, national policy, community, midwifery services.

Copyright@author

Licensed by CC BY-SA 4.0

ABSTRAK

Kebijakan nasional memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi layanan kebidanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terisolasi (3T) yang berbasis komunitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, diperlukan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan dari pemerintah maupun yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak kebijakan nasional terhadap pengembangan program kebidanan yang inovatif, terutama di daerah 3T. Metode Penelitian ini menggunakan metode Scoping Review dengan mengumpulkan, menyeleksi, mengekstraksi dan mengkaji artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan, pencarian literature menggunakan database Scopus, Proquest dan Scince Direct dan Google Scholar dengan Ruang lingkup yang dibatasi dengan framework PICO (*Population / Problem, Intervention, Comparison, Outcame*) berdasarkan data inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pencarian literatur menghasilkan 24 artikel ilmiah yang kemudian melalui proses penyeleksian, penilaian dan review menggunakan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analysis) terdapat 5 (lima) artikel yang relevan. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang mendukung inklusivitas dan pemberdayaan komunitas akan mendorong terciptanya solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kebidanan. Kesimpulan dalam penelitian yaitu kebijakan nasional yang responsif dapat berperan signifikan dalam mengatasi tantangan pelayanan kesehatan di daerah 3T, sehingga memperkuat sistem kesehatan yang lebih adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

National policy stragically encorages innovation in community-based midwifery services in disadvantaged, frontier and isolated

areas (3T). To improve the quality of maternal and child health services, an adaptive and sustainable approach is needed from the government and involving the communities active participation. This study examines the impact of national policies on the development of innovative midwifery programs, especially in 3T areas. This research method uses the Scoping Review method by collecting, selecting, extracting and reviewing scientific articles that are relevant to the research topic based on predetermined keywords, literature searches using the Scopus, Proquest and Scince Direct databases and Google Scholar with a limited scope with the PICO framework (Population / Problem, Intervention, Comparison, Outcame) based on inclusion and exclusion data. The results of research conducted based on a literature search resulted in 24 scientific articles which then went through a process of selection, assessment and review using PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analysis) there were 5 (five) relevant articles. The results of the analysis show that national policies that support inclusiveness and community empowerment will encourage the creation of innovative solutions that are relevant to local needs. In addition, collaboration between the government, non-governmental organizations and local communities is a key factor in improving access and quality of midwifery services. This indicates that responsive national policies can play a significant role in addressing health service challenges in the 3T areas, thereby strengthening a more equitable and sustainable health system.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk mencapai salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menegaskan bahwa status Kesehatan merupakan salah satu komponen utama yang harus diperhatikan, karena merupakan investasi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional melalui sumber daya manusianya yang sehat ⁽¹⁾.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, inovasi dalam setiap sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk layanan kesehatan. Salah satu bidang yang memerlukan perhatian khusus adalah layanan kebidanan, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil). Permasalahan kebidanan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) di Indonesia melibatkan berbagai tantangan yang menghambat upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti keterbatasan akses layanan kesehatan ibu dan anak.

Inovasi layanan kebidanan berbasis komunitas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses, tetapi juga untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak ⁽²⁾.

Kebijakan nasional memainkan peran krusial dalam mendorong inovasi layanan kebidanan, terutama yang berbasis komunitas. Kebijakan nasional diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan dan implementasi inovasi di tingkat daerah, sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan kesehatan. Dalam konteks ini, kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal dapat menggerakkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan kebidanan ⁽³⁾.

Peran kebijakan nasional dalam mendorong inovasi layanan kebidanan di daerah 3T yaitu melalui kebijakan peningkatan akses kesehatan, pengembangan teknologi kesehatan berbasis digital, kebijakan penguatan peran badan dan kader kesehatan sertamengembangkan inovasi layanan kebidanan berbasis kearifan lokal. Melalui

pendekatan Inovasi layanan kebidanan berbasis komunitas ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam menjaga kesehatan reproduksi menjadi salah satu dalam pelayanan kebidanan sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan secara signifikan ⁽⁴⁾.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kebijakan nasional dalam mendorong inovasi layanan kebidanan daerah 3T yang berbasis komunitas. Dengan memahami hubungan antara kebijakan dan inovasi, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan serta memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai layanan kebidanan yang lebih baik.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini termasuk *Scoping Review* dengan mengumpulkan, menyeleksi, mengekstraksi dan mengkaji artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan *framework PICO* (*Population / Problem, Intervention, Comparison, Outcome*). Pembatasan ruang lingkup penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Framework PICO

Komponen	Keterangan	Kriteria	
		Inklusi	Eksklusi
Population/ Problem	Layanan Kebidanan	Layanan Kebidanan 3T	Layanan kebidanan daerah perkotaan, urban dan rural
Intervention	Kebijakan Kesehatan	Kebijakan inovasi layanan kebidanan daerah 3T	Manajemen layanan kebidanan
Comparative	-	-	-
Outcome	Peningkatan Inovasi	Peningkatan inovasi layanan kebidanan berbasis komunitas daerah 3T	Penurunan angka kematian Ibu dan Anak
Dates		2023 2024	- Others

Langkah pada penelitian ini meliputi membuat pertanyaan penelitian, mencari literatur, menyeleksi studi dengan kriteria kelayakan dan kualitas, serta melakukan sintesis. Pertanyaan penelitian ini antara lain Bagaimanakah kebijakan nasional yang relevan dalam mendorong inovasi layanan kebidanan di daerah 3T, Bagaimanakah dampak kebijakan nasional terhadap pengembangan dan

implementasi inovasi layanan kebidanan berbasis komunitas di daerah 3T ? Bagaimana menggali faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan nasional terkait inovasi layanan kebidanan di daerah 3T dan Bagaimanakah mengukur efektivitas kebijakan nasional dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kebidanan di daerah 3T melalui pendekatan berbasis komunitas. Pencarian literature pada penelitian ini menggunakan database Scopus, Proquest dan Scince Direct dan Google Scholar. Pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan kata kunci “Kebijakan Nasional”, “Inovasi”, “Layanan Kebidanan”, “Daerah 3T”, “Komunitas”. Seleksi artikel dilakukan dengan menggunakan kriteria kelayakan yaitu inklusi dan eksklusi. Proses sintesis dilakukan dengan cara membandingkan literatur yang memenuhi penilaian kualitas. Data sintesis mengacu kepada tujuan penelitian ini yaitu mengeksplorasi bentuk dan peran kebijakan nasional dalam mendorong inovasi layanan kebidanan daerah 3T berbasis komunitas.

HASIL

Hasil pencarian artikel dengan menggunakan *Scopus, Proquest, Science Direct* dan *Google Scholar* menemukan 24 artikel ilmiah. Langkah selanjutnya penghapusan duplikasi dan judul artikel ditemukan 23 artikel yang kemudian dilakukan seleksi dengan menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi serta ditemukan 13 artikel ilmiah yang relevan. Artikel tersebut dilakukan penilaian dan review dengan melihat keseluruhan isi dan berdasarkan penilaian yang dilakukan, terdapat 5 artikel yang relevan yang disajikan pada Seleksi sumber literature menggunakan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analysis*) seperti pada Tabel 2.

Hasil proses sintesis dengan membandingkan literatur yang memenuhi penilaian kualitas asuransi pemerintah kebijakan nasional dalam mendorong inovasi layanan kebidanan daerah 3T berbasis komunitas terlihat pada Tabel 3.

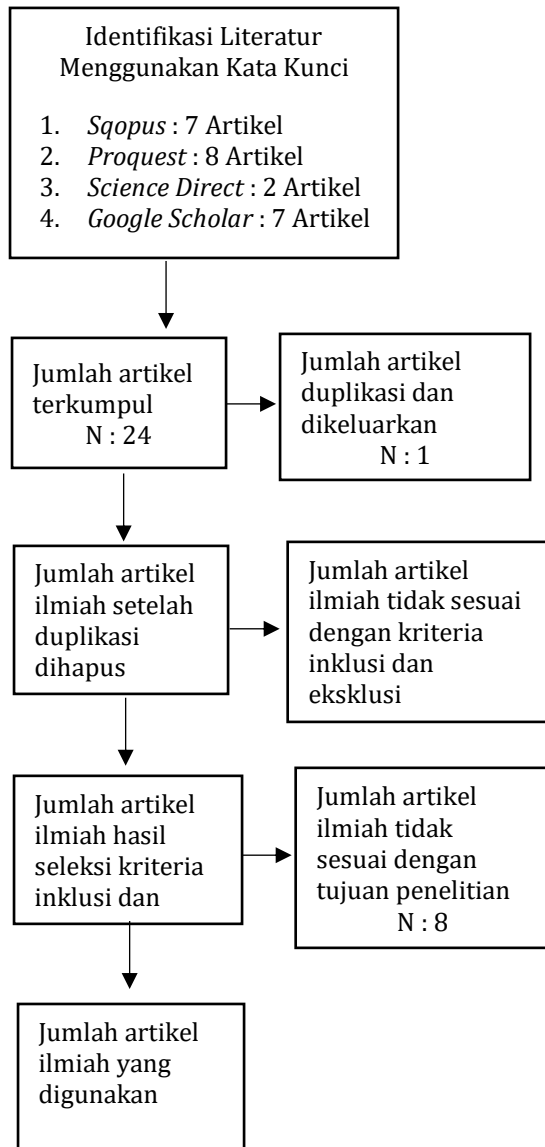
PEMBAHASAN

Kebijakan Peningkatan Akses Kesehatan Berbasis Komunitas

Masyarakat dunia sudah menciptakan komunitas yang lebih sehat sebagai prioritas utama dikarenakan memiliki pengaruh langsung

terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan paradigma ini, perluasan akses terhadap layanan kesehatan menciptakan masyarakat yang lebih sehat.

Tabel 2. PRISMA Artikel Ilmiah



Berdasarkan hasil yang didapat ada satu artikel yang menyatakan bahwa Kebijakan penggunaan Toolkit berbasis masyarakat dan lapangan yang dirancang di daerah pedesaan dan terpencil negara Australia terbukti mengurangi hambatan untuk mengoperasionalkan strategis terutama persalinan yang aman di daerah pedesaan dan terpencil, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anto J. Hadi et al (2023) menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak secara holistik dapat diciptakan

melalui kombinasi layanan kesehatan berbasis kemitraan komunitas. Pendekatan kemitraan komunitas dapat berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan regulasi, pelatihan *interdisipliner* dan inovasi teknologi ⁽¹⁰⁾.

Peningkatan akses kesehatan berbasis komunitas dan keberlanjutan program promosi kesehatan menjadi komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan dan memberikan pendidikan kesehatan masyarakat jangka panjang. Berdasarkan pencarian literatur ditemukan bahwa program Rukuns diterapkan di berbagai puskesmas daerah terpencil di Indonesia terbukti dapat membawa kontribusi positif terhadap performa kader posyandu dan sangat membantu puskesmas dalam pelaksanaan program kebidanan di puskesmas, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2024) yang menyebutkan bahwa pemberian pelatihan bagi kader dan tenaga kesehatan terutama bidan serta strategi komprehensif yang melibatkan sekolah, posyandu dan masyarakat untuk menjamin keluarga menerima pengetahuan terkait kesehatan ibu dan anak dan monitoring yang berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Bima memberikan dampak yang positif untuk mengurangi angka stunting, kematian ibu dan bayi serta pembiayaan persalinan bagi ibu bersalin ⁽¹¹⁾.

Pengembangan Teknologi Berbasis komunitas

Penerapan dan penggunaan teknologi dapat menyelesaikan permasalahan berbagai bidang kehidupan termasuk kesehatan ibu dan anak. Kemajuan teknologi mempunyai dampak yang signifikan terhadap layanan kebidanan terutama dalam hal meningkatkan kualitas layanan dan memastikan akses yang adil dan merata terhadap informasi kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan hasil studi literatur yang ditemukan menyatakan bahwa pelayanan transformasi digital untuk menjangkau daerah pinggiran United Kingdom untuk efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, kesetaraan, inklusif dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan pasien.

Tabel 3. Ekstraksi Data Artikel Ilmiah

Penulis	Jurnal	Judul	Metode	Hasil
Lisa Hinton, et all	BMJ, 2023	<i>Quality framework for remote antenatal care: qualitative study with women, healthcare professionals and system-level stakeholders</i>	Studi Kualitatif	105 tenaga Kesehatan professional, manajer dan stakeholder menyambut positif kerangka kerja pelayanan antenatal jarak jauh melalui pelayanan transformasi digital untuk menjangkau daerah pinggiran united kingdom untuk efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, kesetaraan, inklusif dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan pasien ⁽⁵⁾
Fiona Faulks, et all	AJRH, 2024	Barriers and enablers to accessing perinatal health services for rural Australian women: A qualitative exploration of rural health care providers perspectives	Kualitatif	Modal sosial (<i>social capital</i>) seperti pendanaan kolaboratif (Federal dan negara bagian) serta komunitas sangat berguna bagi kesehatan ibu dan anak khusus nya di daerah pedesaan dan daerah terpencil Australia untuk mengurangi hambatan aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak ⁽⁶⁾
Jo longman, et all	Elsevier, 2023	Maternity services for rural and remote Australia: barriers to operationalising national policy	Kualitatif	Kebijakan penggunaan Toolkit berbasis masyarakat dan lapangan yang dirancang didaerah pedesaan dan terpencil negara Australia terbukti mengurangi hambatan untuk mengoperasionalkan strategis terutama persalinan yang aman di daerah pedesaan dan terpencil ⁽⁷⁾
Lois McKellar, et all	AJRH, 2023	'There is no other option': Exploring health care providers' experiences implementing regional multisite midwifery model of care in South Australia	Mix Methods	Kebijakan pemberian asuhan kebidanan berkesinambungan dan komprehensif yang melibatkan masyarakat dan peningkatan pengetahuan teknologi dengan semua resiko kasus kebidanan cukup efektif untuk manfaat dan kepuasan ibu sebagai pelayanan hamil dan bersalin standar di daerah pinggiran Australia dengan mempertimbangkan kebutuhan local ⁽⁸⁾
Sri Asih Gahayu	Jurnal Widyais wara Indonesia, 2024	Analisis Implementasi dan Dampak Materi Pelatihan Nusantara Sehat Berbasis Tim pada Puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan	Kualitatif	Program Rencana Usulan Kegiatan Nusantara Sehat (RUKUNS) diterapkan di berbagai puskesmas daerah terpencil terbukti dapat membawa kontribusi positif terhadap performa dan sangat membantu puskesmas dalam pelaksanaan program kebidanan di puskesmas ⁽⁹⁾

Penggunaan teknologi juga dapat di implemetasikan kepada masyarakat atau komunitas dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan literasi digital pada komunitas sebagai upaya pengembangan layanan kesehatan khususnya layanan kebidanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winda (2024) menyebutkan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kebidanan atau kesehatan adalah memperkenalkan telemedicine sebagai

media layanan kesehatan online kepada masyarakat dengan manfaat memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan atau kebidanan tanpa terkendala oleh keterbatasan geografis dan minimnya fasilitas kesehatan khususnya daerah terpencil ⁽¹²⁾.

Kebijakan Penguatan Peran Kader Kesehatan

Kader kesehatan harus diberdayakan dan ditingkatkan untuk peningkatan standar layanan kebidanan dikarenakan paling dekat dengan masyarakat melalui pos kesehatan

terutama daerah terpencil. Inisiatif pos kesehatan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan penting seperti imunisasi dan pemeriksaan kehamilan. Pemberian pelatihan dan dukungan kepada kader atau relawan masyarakat pos kesehatan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan ibu dan anak yang berkelanjutan ⁽¹³⁾. Berdasarkan hasil studi literatur yang ditemukan menyatakan bahwa kebijakan pemberian asuhan kebidanan berkesinambungan dan komprehensif yang melibatkan masyarakat dan peningkatan pengetahuan dan pelatihan teknologi dengan semua risiko kasus kebidanan cukup efektif untuk manfaat dan kepuasan ibu sebagai pelayanan hamil dan bersalin standar di daerah pinggiran Australia dengan mempertimbangkan kebutuhan local. Penelitian yang dilakukan oleh Leistiana (2022) menjelaskan bahwa Transformasi layanan primer yang mendekatkan layanan kesehatan sampai tingkat dusun dengan masyarakat atau komunitas membutuhkan pelatihan untuk menunjang pembentukan posyandu prima di desa dan pelaksanaan posyandu dusun terpadu, kunjungan rumah oleh kader yang mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan. Pembentukan Posyandu Prima dan Posyandu Dusun melalui program Transformasi Layanan Primer mampu meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat dan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat ⁽¹⁴⁾.

Inovasi Layanan Kebidanan Berbasis Kearifan Lokal

Pemanfaatan adat istiadat atau budaya menjadi salah satu cara untuk melakukan inovasi program layanan kebidanan dan dapat menghasilkan strategi yang sesuai dan disukai oleh lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil studi literatur yang ditemukan menyatakan bahwa sebuah bentuk kearifan lokal seperti Modal sosial (*social capital*) dengan pendanaan kolaboratif (Federal dan negara bagian) serta komunitas sangat berguna bagi kesehatan ibu dan anak khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil Australia untuk mengurangi hambatan aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Modal sosial dikembangkan dari waktu ke waktu dalam konteks kehidupan bersama dan memiliki potensi untuk menjadi intervensi dalam interaksi sosial. Bergantung

pada ciri-ciri masyarakatnya yang beradab, setiap lokasi dan wilayah memiliki modal sosial yang unik. Melalui adaptasi dengan nilai-nilai modal sosial yang ada dan memeriksa fitur-fitur modal sosial masyarakat, dapat menjadi sarana untuk membina interaksi sosial dan mengedukasi masyarakat tentang masalah kebidanan. Nilai-nilai agama, budaya, dan sosial merupakan modal sosial yang biasanya ada di masyarakat. Alat intervensi yang efektif untuk menjalankan program penanganan stunting yang akan dilaksanakan dapat diciptakan dengan mengkolaborasikan kumpulan nilai-nilai yang ada ⁽¹⁵⁾.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan nasional memainkan peran penting dalam Layanan yang lebih efisien dan tahan lama dapat dihasilkan melalui kebijakan yang mendorong pelatihan bidan, penggunaan teknologi, akses kesehatan, dan pengembangan masyarakat. Agar inovasi kebidanan di daerah 3T dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah harus terus meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, meningkatkan dukungan infrastruktur, dan membina kolaborasi lintas sektor.

Berdasarkan uraian diatas, rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam layanan kebidanan di daerah 3T berbasis komunitas yaitu investasi platform telemedicine untuk membantu mengatasi keterbatasan akses fisik ke layanan kebidanan, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi kader dan bidan, termasuk Pelatihan dalam penggunaan teknologi kesehatan dan manajemen layanan berbasis komunitas, agar mereka mampu memberikan pelayanan berkualitas di daerah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur terbatas, Program-program kesehatan ibu dan anak yang berbasis komunitas seperti Posyandu perlu diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan kader kesehatan, Pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi bidan dan tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah 3T, baik dalam bentuk tunjangan finansial, jaminan kesehatan, maupun pendidikan, Memperkuat sistem rujukan kesehatan di daerah 3T dengan dukungan teknologi dan kerjasama antar fasilitas Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wulandari. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Keterbukaan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatra. Vol. 15, Ayon. 2024. 37–48 p.
2. CHAYATIN N. Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi 1. Ilmu Kesehatan masyarakat 2. Keperawatan. 2023.
3. Rais MA, Ibrahim MA, Lambali S. Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe. JAKPP (Jurnal Anal Kebijak Pelayanan Publik). 2024;18–39.
4. Wilem Reinhart Ridolof Pomeo, Eko Winarti. Dinamika Implementasi Kebijakan Penempatan TenagaKesehatan Di Daerah Terpencil : Tantangan DanRealitas Lapangan. J Kesehat Tambusai. 2024;5:2309–29.
5. Liang Z, King JC, Nagle C, Pain T, Mallett AJ. Empowering and Building the Capabilities of Mid-Level Health Service Managers to Lead and Support the Health Workforce—A Study Protocol. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2024;21(8). Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85202617221&doi=10.3390%2Fijerph21080994&partnerID=40&md5=feac501bdbc6cfb989c78d1048ea208f>
6. Faulks, F., Edvardsson, K., & Shafiei, T. (2024). Barriers and enablers to accessing perinatal health services for rural Australian women: A qualitative exploration of rural health care providers perspectives. *Australian Journal of Rural Health*, 32(4), 774–788. <https://doi.org/10.1111/ajr.13147>
7. Longman, J., Kornelsen, J., Pilcher, J., Kildea, S., Kruske, S., Grzybowski, S., Robin, S., Rolfe, M., Donoghue, D., Morgan, G. G., & Barclay, L. (2017). Maternity services for rural and remote Australia: barriers to operationalising national policy. *Health Policy*, 121(11), 1161–1168. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.09.012>
8. McKellar, L., Fleet, J. A., & Adelson, P. (2024). ‘There is no other option’: Exploring health care providers’ experiences implementing regional multisite midwifery model of care in South Australia. *Australian Journal of Rural Health*, 32(1), 67–79. <https://doi.org/10.1111/ajr.13066>
9. Gahayu, S. A. (2024). Analisis Implementasi dan Dampak Materi Pelatihan Nusantara Sehat Berbasis Tim pada Puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 5(02), 11–22.
10. Hadi, A. J., Cahyono, D., Mahendika, D., & AMAK, K. L. (2023). Membangun Komunitas yang Lebih Sehat: Meningkatkan Akses ke Layanan Kesehatan, Nutrisi, Kebugaran Terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 345–353. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.374>
11. Firdaus, Ahmad, S., Akhyar, & Haeril. (2024). Efektivitas, Stunting, Prevalensi, Kabupaten Bima. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(3), 366–376.
12. Azmi Meisari, W., Nurhayati, A., Dhipa Putri, A., Nur Aulia, S., Studi Administrasi Rumah Sakit, P., Ilmu Kesehatan, F., & Surakarta, A. (2024). Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dengan Pengenalan Telemedisin Sebagai Media Layanan Kesehatan Online. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6959–6966.
13. Nasution, D. E. S. (2022). Peningkatan dan Pemberdayaan Kader Posyandu.
14. Indriyati, L., Wahyudin, A., & Sulistyowati, E. (2023). Evaluasi Program Pilot Project Transformasi Layanan Primer di Puskesmas Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2022. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 65–80. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.311>
15. Hamdi, S., Dewi Satria Elmiana, Ikmal Maulana, Nurul Haromain, Ihfan Rahmawadi, & Firdaus Abdul Malik. (2023). Pengembangan Model Penanganan Stunting di NTB: Studi Kebijakan Di Desa Bilebante, Lombok Tengah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), 209–234. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.346>